

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Oleh : Marizatur Rizkiyah, Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.
dan Abshoril Fithry, S.H., M.H.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menyempurnakan kesejahteraan masyarakat pastoral, menyempurnakan kualitas hidup yang fana dan mengurangi kemiskinan serta dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Hal ini juga tertuang dalam Komposisi 6 ayat (2) huruf (c) Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa penyempurnaan kekayaan penggembalaan masyarakat diprioritaskan untuk meningkatkan pendapatan yang menguntungkan bagi keluarga miskin. Namun kalimat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga miskin dalam Peraturan Menteri tersebut menimbulkan kekaburan hukum yakni tidak dijelaskannya terkait seperti apa kategori-kategori keluarga miskin.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan penggunaan dana desa sebagai salah satu bentuk kewenangan dari pemerintah tersebut dan untuk mengetahui mekanisme pengawasan penggunaan dana desa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Hasil dalam penelitian ini yaitu (1) Dengan tidak dijelaskannya secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan tentang peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat miskin memberikan peluang kepada pemerintah desa untuk memanfaatkan aturan tersebut dengan mengarahkan bantuannya kepada keluarga dan orang-orang terdekat & pendukungnya, bahkan ada juga yang memanfaatkan penggunaan dana desa kepada masyarakat miskin dengan memberikan bantuan sambil menempelkan syarat dan ajakan untuk mendukung kepala desa atau calonnya agar terpilih menjadi kepala desa berikutnya. (2) Partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa merupakan salah satu kunci keberhasilan penggunaan dan pemanfaatan dana desa. Masyarakat sebagai elemen penting seluruh rangkaian proses pembangunan harus bisa mengambil bagian dalam mengusulkan dan mengawasi penggunaan dana desa dengan tujuan dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa masih tergolong rendah, hal ini disebabkan karena di samping kurangnya ruang yang diberikan oleh pemerintah desa dengan tidak transparansinya penggunaan dana desa, masyarakat sendiri masih belum timbul motivasi tinggi karena tingkat pendidikan yang rendah dan sibuk dengan pekerjaannya sendiri membuat mereka tidak dapat memikirkan manfaat pengawasan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh masyarakat.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Penggunaan dana desa untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat miskin masihlah belum optimal dan efektif, perubahan aturan dalam peraturan perundang-undangan harus lebih detail untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Kata Kunci : Penggunaan Dana Desa, pengawasan masyarakat, masyarakat miskin.



ABSTRACT

Juridical Review of the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 11 of 2019 concerning Priorities for Use of Village Funds in 2020

By : Marizatur Rizkiyah, Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.
dan Abshoril Fithry, S.H., M.H.

The use of the Village Fund is prioritized to finance community development and empowerment aimed at improving the welfare of the pastoral community, improving the quality of life that is transitory and reducing poverty and is stated in the Village Government Work Plan. This is also stated in Composition 6 paragraph (2) letter (c) Regulation of the Minister of Villages, Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 11 of 2019 concerning Priority for the Use of Village Finance, it is stated that the improvement of community grazing wealth is prioritized to increase income that is profitable for poor families. However, the sentence to increase the economic income of poor families in the Ministerial Regulation creates legal confusion, namely it does not explain what the categories of poor families are.

The purpose of this study is to determine the consideration of the use of village funds as a form of authority from the government and to determine the mechanism for monitoring the use of village funds that should be carried out by the community. The research method used in this research is using normative legal research methods using a statutory approach and a conceptual approach.

The results in this study are (1) By not explaining in detail in the legislation on increasing the economic income of the poor, it provides opportunities for the village government to take advantage of these rules by directing their assistance to their families and closest people & supporters, some even take advantage of the use of village funds to the poor by providing assistance while attaching conditions and invitations to support the village head or his candidate to be elected as the next village head. (2) Community participation in supervising the use of village funds is one of the keys to the successful use and utilization of village funds. The community as an important element in the whole series of development processes must be able to take part in proposing and supervising the use of village funds with the aim of bringing the maximum benefit to improving the quality of life of the community. However, community participation in supervising the use of village funds is still relatively low, this is because in addition to the lack of space provided by the village government with the lack of transparency in the use of village funds, the community itself still has not high motivation due to low levels of education and busy with their own work. making them unable to think about the benefits of monitoring the use of village funds by the community.

The conclusions in this study are the use of village funds to increase the economic income of the poor is still not optimal and effective, changes in the laws and regulations must be more detailed to reduce fraud committed by the village government.

Keywords : Use of Village Funds, community supervision, the poor.